

**EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN
TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Geografi



Disusun Oleh :
Anton Waskita
NIM : E100130044

**FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

**HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI**

**EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN
TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN PUWOREJO TAHUN 2014**

ANTON WASKITA

NIRM : E100130044

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada :

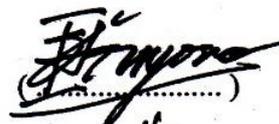
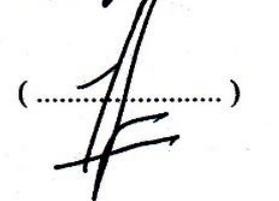
Hari,Tanggal : Rabu 21 Oktober 2015

Dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Tim Penguji

Pembimbing I : Drs. Priyono, M.Si.

Pembimbing II : Dra. Umrotun,M.Si.


(.....)

(.....)

Surakarta, 2 Desember 2015

Dekan


Drs. Priyono, M.Si.



**EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN
TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014**

Anton Waskita¹, Priyono², Umrotun³

¹Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta

^{2,3}Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta

anton_751@yahoo.co.id

E100130044

ABSTRAK

Pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) telah diatur dalam perundang-undangan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar untuk menjamin kualitas pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Perbedaan antara peraturan dengan kondisi di lapangan mungkin saja terjadi dalam penerapannya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Grabag dengan tujuan : (1) mengetahui ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah dasar negeri, (2) mengidentifikasi kualitas pendidikan tingkat sekolah dasar, (3) mengidentifikasi jumlah kebutuhan riil fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar negeri, dan (4) mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar negeri di Kecamatan Grabag.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik analisis data sekunder. Data instansional yang digunakan yaitu data jumlah SD, jumlah murid, guru, ruang kelas, jumlah meja dan kursi dan data-data penunjang yang lain. Survei lapangan digunakan untuk uji akurasi hasil interpretasi citra untuk penggunaan lahan dengan metode *purposive sampling*, khususnya terhadap daerah permukiman dan lokasi SD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan SD sudah tersedia di seluruh desa kecuali di Desa Tlepokkulon. Pelayanan jumlah SD yang sebanyak 37 unit juga sudah mampu menjangkau keseluruhan wilayah kecamatan ini. Perbandingan antara data ketersediaan dengan peraturan berdasarkan SPM di dalam PERMENDIKNAS No 15 tahun 2010, kekurangan fasilitas pendidikan terjadi di komponen : unit SD, jumlah ruang kelas dan kemungkinan kekurangan meja dan kursi SD, sedangkan jumlah guru sudah mencukupi. Kualitas pelayanan (KP) dan Kualitas daya serap (KDS) sebagian besar memiliki nilai yang baik. Hasil evaluasi terhadap fasilitas pendidikan menggunakan SPM dan kondisi riil menunjukkan bahwa kekurangan SD terjadi bagi Desa Tlepokkulon. Kekurangan ruang kelas terdapat di 6 desa. Kekurangan guru terjadi karena sebagian guru yang mengajar merupakan guru bantu atau guru wiyata bakti. Kebutuhan terhadap kekurangan meja dan kursi tidak dapat diketahui secara pasti karena data yang tidak lengkap.

Kata Kunci : Pendidikan, Sekolah Dasar, Standar Pelayanan Minimal, Grabag

**EVALUATION OF EDUCATIONAL FACILITIES AVAILABILITY
IN STATE ELEMENTARY SCHOOL
IN THE DISTRICT OF GRABAG, PURWOREJO REGENCY 2014**

Anton Waskita¹, Priyono², Umrotun³

¹Students of the Faculty of Geography, Universitas Muhammadiyah Surakarta

^{2,3}Lecturer at the Faculty of Geography, Universitas Muhammadiyah Surakarta

anton_751@yahoo.co.id

E100130044

ABSTRACT

Educational services in elementary school (SD) has been set in legislation through the Minimum Service Standard (SPM) basic education to ensure the quality of education that implemented by each educational unit. Differences between regulatory condition in the field may occur in practice.

This research was conducted in the District of Grabag for the purpose of : (1) to determine the availability of educational facilities of state elementary school, (2) to identify the quality of education in state elementary school, (3) to identify the number of the real needs for educational facilities of state elementary school, and (4) to evaluate the availability of educational facilities in the state elementary school in the District of Grabag.

The method used in this research is descriptive method with secondary data analysis techniques. Institutional data used are the data number of SD, the number of students, teachers, classrooms, number of tables and chairs and other supporting data. The field survey is used to check the result of image interpretation for land use by purposive sampling method.

The result indicate that the elementary educational facilities are available in all villages except in the Tlepok kulon village. The service of SD as many as 37 units have also been able to reach the entire area of this district. Comparisons between data availability facilities with regulations based on SPM in PERMENDIKNAS No 15 tahun 2010, the lack of educational facilities occurred in component of : SD units, the number of classrooms, and the possible shortage of tables and chairs, while the number of teachers is sufficient. Quality of service (KP) and the Quality of Absorption (KDS) mostly had a good value. The result of evaluation of the facilities using SPM and the real condition shows that lack of SD occurred for Tlepok kulon village and there is a shortage classrooms in 6 villages. Teacher shortage occurs because some teacher who teach is an auxiliary teacher or wiyata bhakti teacher. The need for a shortage of tables and chairs can not be known with certainty because of incomplete data.

Keyword : Education, Elementary school, Minimum Service Standard (SPM), Grabag District

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kualitas pendidikan yang baik menjadi hal lumrah sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas *output* pendidikan. Kualitas pendidikan, sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ketersediaan dan kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana (Muhammad Nuh, sambutan HARDIKNAS tahun 2014).

Sekolah Dasar (SD) menjadi salah satu sasaran dalam tujuannya membentuk generasi muda yang berkualitas. SD sebagai jenjang pertama dalam pendidikan formal anak menjadi tumpuan yang utama membentuk karakter anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kekurangan jumlah guru menjadi masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo seperti yang sempat ramai diberitakan bahwa pendidikan di kabupaten ini akan mencapai puncak krisis guru pada tahun 2014. Kondisi kekurangan tersebut juga berdampak bagi kegiatan pendidikan yang berlangsung di Kecamatan Grabag. Ditambah lagi dengan bencana banjir yang terjadi di penghujung tahun 2013 yang secara langsung tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi belajar mengajar namun juga terhadap fasilitas pendidikan yang ada di kecamatan ini. Hal ini menjadi konsen karena kualitas pendidikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dipengaruhi oleh 3 hal, hal ini berarti 2 masalah utama telah terjadi di kecamatan ini, yaitu resiko kekurangan guru, dan kondisi sarana prasarana (fasilitas) yang tidak memadai.

PERMENDIKNAS No 15 tahun 2010 telah mengatur tentang bagaimana cara pelaksanaan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang telah dibuat dalam pelaksanaannya dilapangan tidak harus saklek, namun harus dapat luwes mengikuti kondisi yang ada dilapangan.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar negeri di Kecamatan Grabag.
2. Mengidentifikasi kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Grabag.
3. Mengidentifikasi jumlah kebutuhan riil fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar negeri di Kecamatan Grabag.
4. Mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar negeri di Kecamatan Grabag.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar (SD) merupakan wujud nyata pendidikan formal untuk membentuk karakter anak usia 7 – 12 tahun. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam undang-undang, proses pendidikan yang dilaksanakan di SD diharapkan mampu membentuk karakter jiwa dan perilaku anak yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Proses pendidikan dalam lingkup sekolah dasar dilaksanakan selama kurun waktu minimal 6 (enam) tahun. Setiap sekolah dasar merupakan satuan pendidikan dengan dikepalai oleh seorang Kepala Sekolah dengan dibantu oleh tenaga pendidik dengan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta tokoh masyarakat yang berperan sebagai komite sekolah.

2.2 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas dapat diartikan sebagai sarana/alat pendidikan yang bertujuan untuk melancarkan fungsi. Jadi yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah berbagai macam sarana/alat yang mampu mendukung pelaksanaan pendidikan (proses belajar mengajar) sehingga dapat tercapai fungsi/tujuan pendidikan. Digunakan istilah fasilitas disini bertujuan agar cakupan yang lebih luas terkait instrumen penyelenggaraan pendidikan.

Sesuai dengan PERMENDIKNAS No 15 tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan PERMENDIKBUD No 23 tahun 2013, standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM Pendidikan dasar) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. SPM untuk pendidikan dasar mencakup 2 (dua) kategori yaitu untuk SD/MI dan SMP/MTs.

2.3 Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh dapat diartikan sebagai cara memperoleh informasi atau pengukuran daripada objek atau gejala, dengan menggunakan sensor dan tanpa ada hubungan langsung dengan objek atau gejala tersebut (Sutanto, 1986).

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk berbagai disiplin ilmu merupakan hal umum yang dilakukan dewasa ini. Hal ini tentunya sesuai dengan kelebihan yang dimiliki untuk menyadap informasi terhadap obyek tanpa harus kontak langsung dengan objek terkait yang berarti akan menghemat waktu dan biaya.

Identifikasi objek sesuai dengan kenampakan yang dihasilkan pada citra pada umumnya tidak akan menggunakan keseluruhan dari kedelapan unsur interpretasi yang ada. Hal ini dikarenakan kenampakan suatu objek memiliki ciri-ciri yang khusus yang akan memudahkan interpreter dalam menentukan apa objek tersebut.

2.4 Sistem Informasi Geografi

SIG dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari *software* komputer, *hardware*, data dan personel untuk input, pengelolaan, analisis, dan penyajian data bereferensi geografis atau informasi geospasial (ITC, 2004 dalam Muhammad Kamal, 2008).

Dalam fungsinya di bidang pemerintahan SIG dapat secara luwes berperan di bidang inventarisasi aset dan perencanaan dengan kemampuannya untuk menampilkan data dan penyajian

menarik dalam bentuk peta. Melalui penyajian yang menarik dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut inilah yang merupakan keunggulan SIG sehingga pemanfaatannya semakin berkembang di berbagai bidang. Lebih spesifiknya lagi, aplikasi utama SIG dalam penelitian ini yaitu untuk inventarisasi aset (fasilitas pendidikan) sekolah dasar (SD) baik bangunannya, maupun kelengkapan yang ada dan harus tersedia di dalamnya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan sumber data dan pengolahan data yang ditampilkan secara tabular. Data diperoleh secara instansional dari dinas pendidikan dan sumber lain yang mendukung. Survei lapangan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode survei yang dilakukan karena ada pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi/subpopulasi (Yunus, 2009). Survei dilakukan terhadap penggunaan lahan sebagai uji akurasi ketelitian interpretasi citra penginderaan jauh untuk penggunaan lahan, secara spesifik yaitu untuk daerah permukiman dan lokasi SD. Unit analisis yang digunakan adalah desa.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Ketersediaan dan kebutuhan fasilitas pendidikan

Tabulasi data instansional yang dipadukan dengan peraturan SPM dari PERMENDIKNAS No 15 tahun 2010 menggambarkan kondisi ketersediaan dan kebutuhan fasilitas pendidikan yang terjadi di lapangan berdasarkan aturan SPM yang ada. Memiliki jumlah SD sebanyak 37 unit, jangkauan pelayanan pendidikan yang ada sudah mampu untuk melayani keseluruhan wilayah kecamatan ini. Daerah-daerah permukiman penduduk Kecamatan Grabag yang diperoleh dari interpretasi citra penginderaan jauh dan telah dilakukan survei lapangan

seluruhnya sudah berada di dalam radius 3 km dari unit SD terdekat.

Berdasarkan SPM, kebutuhan unit SD terjadi karena faktor peraturan jumlah penduduk di suatu desa terhadap jumlah unit SD yang harus ada. Kekurangan 6 unit SD terjadi di 6 desa yaitu : Harjobinangun, Bakurejo, sumberagung, nambanganm Tlepok kulon, dan Sangubanyu. Kebutuhan ruang kelas sesuai SPM adalah disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar (rombel) sehingga pada tahun 2014 terdapat kekurangan sejumlah 6 unit ruang kelas yang tersebar di 6 desa.

Guru seperti yang diprediksi bahwa akan mencapai puncak krisis kekurangan ternyata justru dalam kondisi aman karena jumlahnya sangat mencukupi dengan jumlah rata-rata guru setiap SD mencapai 10 orang. Fasilitas meja dan kursi berdasarkan SPM harus memiliki jumlah yang sama dengan peserta didik. Namun karena data model meja dan kursi tidak lengkap perhitungan dari keterbatasan informasi ini hanya menghasilkan kemungkinan terjadinya kekurangan meja di 3 SD yang berlokasi di 3 Desa, sedangkan untuk kursi secara keseluruhan cenderung tersedia bagi murid jumlah murid yang ada.

4.2 Kualitas pendidikan

Kualitas pendidikan dihitung dengan 6 komponen yang ditampilkan dalam bentuk rasio dan mencari nilai APK dan APM. Hasil perhitungan rasio digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan (KP) pendidikan dan perhitungan nilai APK dan APM digunakan untuk mengetahui kualitas daya serap (KDS) pendidikan.

Hasil perhitungan KP menunjukkan bahwa sebagian besar desa (28 desa) mendapatkan nilai yang baik, 2 desa dengan nilai KP sedang, dan 2 desa dengan KP jelek. Komponen yang berpengaruh dalam nilai KP yaitu rasio SD – penduduk, SD – murid, kelas-murid, dan resiko kekurangan meja yang terjadi di beberapa desa.

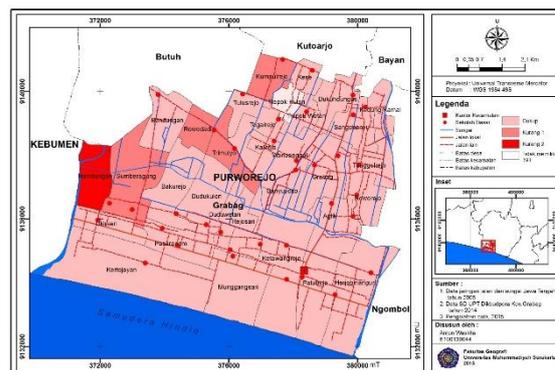
Hasil perhitungan nilai KDS menunjukkan bahwa sebanyak 26 desa

memiliki nilai baik, 5 desa dengan nilai sedang, dan 1 desa dengan kualitas jelek.

4.3 Evaluasi ketersediaan fasilitas pendidikan

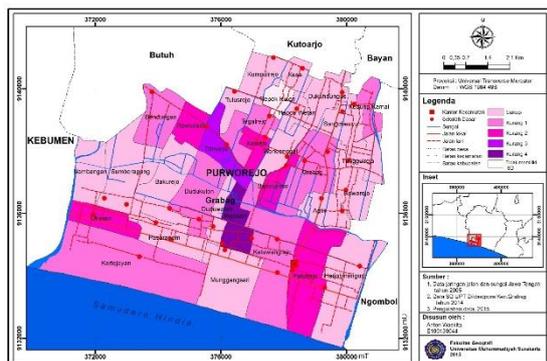
Perhitungan kondisi di lapangan semestinya selain menggunakan acuan dari SPM juga menggunakan pertimbangan lain yang mewakili kondisi yang sebenarnya. Kebutuhan SD berdasarkan SPM yang sejumlah 6 unit di 6 desa, ternyata hanya terjadi untuk 3 desa saja yang sebenarnya membutuhkan. Itupun jika dibandingkan dengan data pendukung lain, maka kebutuhan unit SD baru hanya dibutuhkan di Desa Tlepokkulon, karena 2 desa lain dapat diatasi dengan penambahan ruang kelas.

Kebutuhan ruang kelas (RK) terjadi di 5 desa dengan jumlah total kebutuhan yaitu 6 unit RK. Gambar 4.1 berikut menunjukkan sebaran kebutuhan kelas pada tahun 2014.



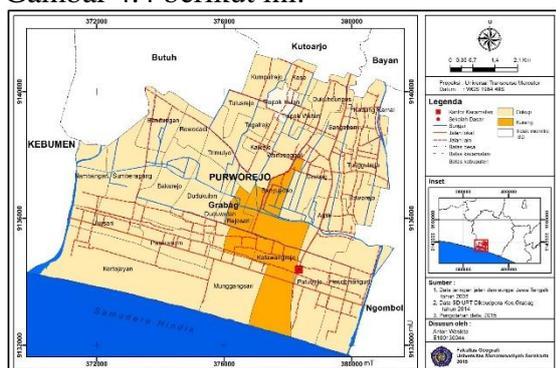
Gambar 4.1 Peta kebutuhan ruang kelas

Evaluasi ketersediaan guru menunjukkan bahwa komponen ini justru memiliki kekurangan. Jumlah guru tahun 2014 yang dianggap sudah mencukupi berdasarkan standar SPM ternyata merupakan jumlah total guru berstatus PNS dan guru bantu dan wiyata bakti yang merupakan guru non resmi. SDN Rejosari di Desa Rejosarii memiliki jumlah kekurangan guru terbanyak yaitu mencapai 4 orang guru dari standar minimal 6 guru. Kebutuhan guru yang tersebar di 14 lokasi desa pada tahun 2014 disajikan pada Gambar 4.2 berikut:

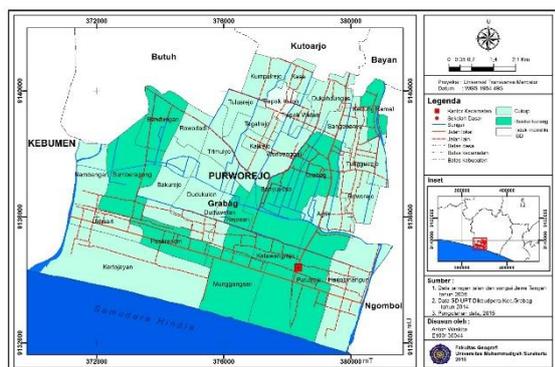


Gambar 4.2 Peta kebutuhan guru

Kebutuhan meja dan kursi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kurang lengkapnya data instansional dan ketidakseragaman model meja dan kursi di lapangan menyebabkan perhitungan tidak mendapatkan akurasi dengan baik. Perhitungan pada bagian ini hanya mampu menampilkan resiko kekurangan yang terjadi di beberapa desa berdasarkan sumsi peneliti. kekurangan meja dan kursi tahun 2014 disajikan pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4.3 Peta kebutuhan meja



Gambar 4.4 Peta kebutuhan kursi

5. Kesimpulan dan Saran

1. Fasilitas pendidikan tingkat SD di Kecamatan Grabag tersedia di setiap

desa, kecuali Desa Tlepok kulon dan tingkat jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan yang ada mampu mencakup keseluruhan kecamatan ini.

2. Terdapat kekurangan unit SD sejumlah 1 buah untuk Desa Tlepok kulon, kekurangan ruang kelas bagi Desa Sumberagung 1 unit, Nambangan 2 unit, Rowodadi 1 unit dan Kumpulrejo 1 unit. Kekurangan guru sejumlah 20 orang terjadi di Desa Rejosari 4 orang, Trimulyo 3 orang, Ukirsari, SD Patutrejo 2 (Patutrejo), Banyuyoso, Kalirejo, dan Rowodadi masing-masing 2 orang, dan Kertojayan, SD Noyosutan (Ketawangrejo), SD Kedunggong (Grabag), Tegalrejo, Dudukulon, Bendungan, dan Kedungkamal masing-masing 1 unit.
3. Ketidakseragaman model meja dan kursi di setiap unit SD dan keterbatasan informasi dan data membuat perhitungan kebutuhan meja dan kursi tidak dapat maksimal. Namun berdasarkan data yang ada diketahui kekurangan fasilitas meja terjadi di desa Ketawang (SD Noyosutan), Banyuyoso, dan Rejosari, sedangkan kekurangan kursi tidak dapat diketahui namun diperkirakan resiko kekurangan kursi terjadi di desa Pasaranom (SD Gadingpasar), Munggangsari, Ketawangrejo (SD Ketawang, dan Noyosutan), Patutrejo (SD Patutrejo 1), Grabag (SD Grabag), Banyuyoso, Rejosari, Sumberagung, Bendungan, dan Kedungkamal.
4. Desa dengan kualitas pelayanan pendidikan jelek terjadi di Desa Sumberagung dan Nambangan. Kualitas sedang di desa Bakurejo, dan Harjobinangun, sedangkan sisanya berjumlah 29 desa memiliki kualitas pelayanan yang baik.
5. Desa Ukirsari memiliki kualitas daya serap pendidikan yang jelek. Desa Nambangan, Sumberagung, Bakurejo, Tulusrejo, dan Tunggulrejo merupakan desa dengan kualitas daya serap pendidikan sedang, dan sisanya

sejumlah 26 desa memiliki kualitas daya serap pendidikan yang baik.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

4.1 Saran

1. Perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan harus dilakukan dengan menyertakan perbandingan dengan komponen pendidikan yang lain meskipun dari kondisi ketersediaan jumlah fasilitas pendidikan mencukupi, sesuai, atau kurang jika ditinjau dari SPM SD yang berlaku karena komponen saling berkaitan satu dengan yang lain.
2. Kebutuhan unit gedung SD jika memungkinkan dapat diganti dengan penambahan ruang kelas dari unit SD yang ada, karena maksimum 1 unit SD dapat menampung rombongan belajar dan memiliki ruang kelas sebanyak 24 buah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Pendidikan Nasional, 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2014. Jumat, 2 Mei 2014. Jakarta
- Kamal, Muhammad. 2008. *Modul Mata Kuliah Sistem Informasi Geografis*. Yogyakarta : Program Diploma III SIG & PJ, Fakultas Geografi UGM.
- Sutanto, 1986. *Penginderaan Jauh*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.